



INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT (IPM)
TERHADAP
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. TUJUAN	3
C. KERANGKA PERSEPSI MASYARAKAT	3
D. SISTEMATIKA LAPORAN	5
BAB II – METODOLOGI	6
A. PENGUMPULAN DATA	6
1. Populasi	6
2. Sampel	6
3. Ukuran Sampel	7
4. Jumlah dan Sebaran Responden	7
B. PROFIL RESPONDEN MASYARAKAT AWAM.....	9
C. PROFIL RESPONDEN AHLI	10
BAB III – INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT	12
A. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS.....	12
B. KESADARAN MASYARAKAT	14
1. Keberadaan Lembaga	14
2. Kewenangan Lembaga.....	17
3. Partisipasi Masyarakat.....	19
C. KEPERCAYAAN MASYARAKAT.....	20
1. Kinerja KY.....	20
2. Keinginan Publik Berpartisipasi	22
3. Independensi KY	23
D. HARAPAN MASYARAKAT	25
1. Keberadaan Lembaga	25
2. Kewenangan Lembaga.....	25
3. Partisipasi Masyarakat.....	27
4. Prioritas Lembaga	27
BAB IV – PENUTUP	29
A. KESIMPULAN	29
B. REKOMENDASI	30

BAB I – PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sepanjang 2017 Komisi Yudisial (KY) menerima 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan. Dari jumlah tersebut, 10 provinsi terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ke KY secara berturut-turut sebagai berikut:

1. DKI Jakarta sebanyak 318 laporan (21,59%);
2. Jawa Timur sebanyak 174 laporan (11,81%);
3. Jawa Barat sebanyak 123 laporan (8,35%);
4. Sumatera Utara sebanyak 115 laporan (7,81%);
5. Sulawesi Selatan sebanyak 73 laporan (4,96%);
6. Jawa Tengah sebanyak 64 laporan (4,34%);
7. Riau sebanyak 62 laporan (4,21%);
8. Sumatera Selatan sebanyak 48 laporan (3,26%);
9. Sumatera Barat sebanyak 41 laporan (2,78%); dan
10. Nusa Tenggara Barat sebanyak 40 laporan (2,72%).

Sebanyak 3.019 laporan tersebut setidaknya menggambarkan persepsi dari masyarakat yang menganggap KY mampu menangani dugaan pelanggaran KEPPH, di samping motivasi lain misalnya agar perkara hukumnya dapat dimenangkan. Tentunya persepsi masyarakat terhadap KY patut untuk diukur tidak hanya sebatas pada jumlah laporan yang diterima, tetapi tingkat pemahaman, sikap dan kecenderungan perilaku masyarakat terhadap KY.

Data di atas juga menarik untuk dicermati lebih lanjut, mengingat bahwa KY memiliki Kantor Penghubung di 10 provinsi tersebut selain di Nusa Tenggara Timur (Kupang) dan Maluku (Ambon). Apakah keberadaan Kantor Penghubung KY memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja KY secara keseluruhan? Namun, sebelum pertanyaan tersebut diajukan, penting juga untuk mengetahui persepsi masyarakat di kota di mana 12 Kantor Penghubung KY tersebut berada.

Komisi Yudisial pertama kali mengukur persepsi masyarakat pada tahun 2016, dan ini adalah tahun kedua KY melakukan hal yang sama. Secara pendekatan dan teknis pelaksanaan Tidak ada perbedaan signifikan antara tahun 2016 dengan 2017. Hanya saja pada tahun ini, KY melakukan survei secara mandiri tanpa melibatkan jejaring Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana tahun sebelumnya.

B. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan indeks persepsi masyarakat terhadap kelembagaan KY adalah untuk:

1. mendapatkan informasi mengenai pemahaman, kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap KY dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sepanjang tahun 2017; dan
2. memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan kepercayaan masyarakat kepada KY.

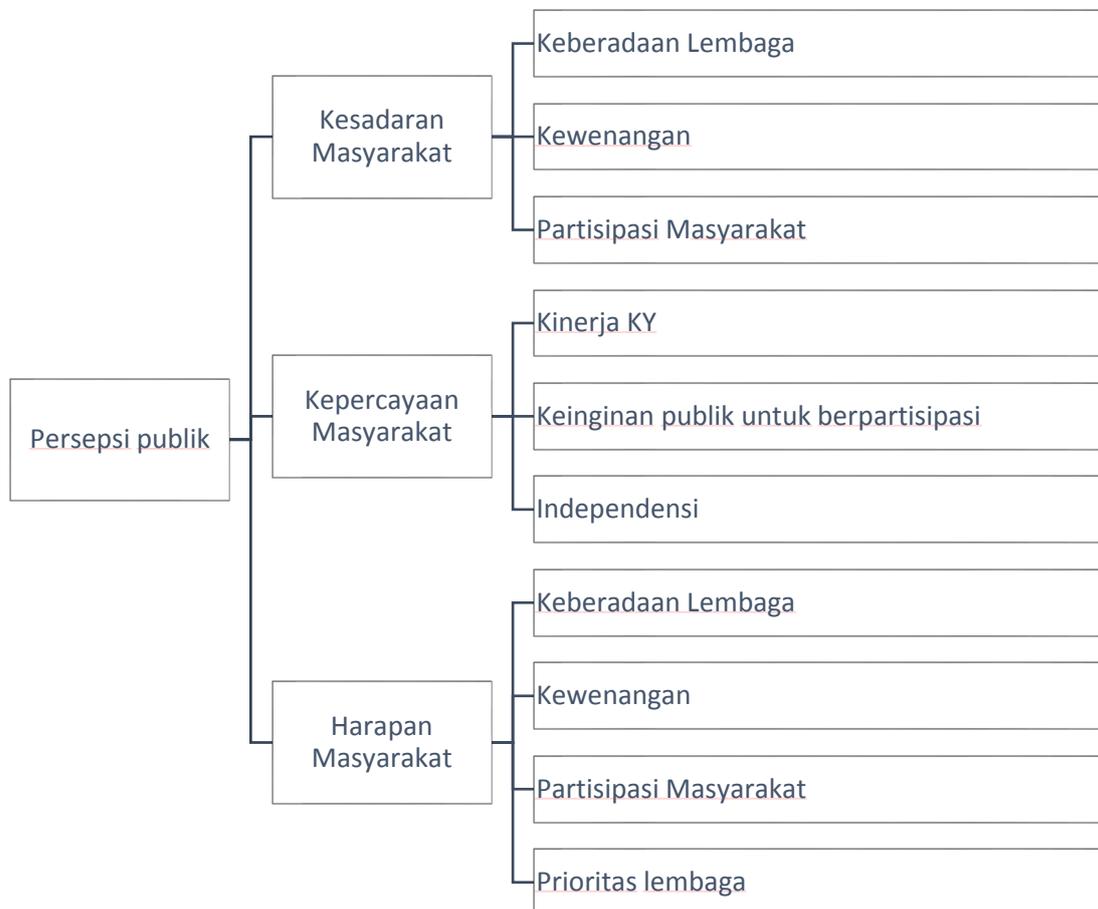
C. KERANGKA PERSEPSI MASYARAKAT

Dasar pemikiran yang digunakan untuk menentukan persepsi masyarakat terhadap KY adalah UU yang mengatur KY itu sendiri, yakni UU No. 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18/2011. Dalam UU tersebut mengatur keberadaan, kewenangan, independensi dan partisipasi publik pada KY. Kemudian ketentuan normatif tersebut disandingkan dengan penafsiran terhadap pandangan dari Dowler mengenai persepsi publik, yang pada konteks kelembagaan KY tercermin dari preferensi; kepercayaan; penilaian dan pengharapan publik terhadapnya.

Kerangka persepsi masyarakat dikembangkan dengan pendekatan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, didahului dengan menentukan dimensi yang membangun persepsi masyarakat terhadap KY. Dimensi tersebut terdiri dari: kesadaran masyarakat (*public awareness*); kepercayaan masyarakat (*public trust*); dan harapan masyarakat (*public expectation*).

Dimensi kesadaran masyarakat dibangun oleh aspek keberadaan lembaga KY; kewenangan KY; dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KY. Untuk dimensi kepercayaan masyarakat, aspek-aspek yang mengkonstruksikannya terdiri dari: kinerja KY; keinginan publik untuk berpartisipasi; dan independensi KY. Sedangkan dimensi harapan publik terdiri dari aspek keberadaan lembaga KY; kewenangan KY; partisipasi masyarakat; dan prioritas lembaga KY.

Gambar 1.1. Kerangka Persepsi Masyarakat Terhadap KY



Survei persepsi KY dilakukan terhadap dua segmen responden yang berbeda: masyarakat awam dan ahli. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa secara umum responden masyarakat awam memiliki informasi, pengetahuan, dan analisis atas KY yang berbeda dibandingkan dengan ahli hukum, para pegiat CSO, jurnalis dan

lainnya. Oleh karena itu, survei akan didesain dan dilaksanakan untuk masing-masing kelompok responden tersebut.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan ini terbagi ke dalam empat Bab yang terdiri dari:

1. BAB I – Pendahuluan
2. BAB II – Metodologi
3. BAB III – Indeks Persepsi Masyarakat
4. BAB IV – Penutup

BAB II – METODOLOGI

A. PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam menyusun Indeks Persepsi Masyarakat adalah hasil survei yang dilakukan terhadap dua kategori responden: masyarakat awam dan ahli.

1. Populasi

Populasi adalah masyarakat yang berada di 13 kota yakni Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Kupang, Ambon dan Mataram. Alasan pemilihan kota-kota tersebut adalah keberadaan KY di Jakarta dan kantor-kantor Penghubung KY di luar Jakarta.

2. Sampel

Sampel responden masyarakat awam diperoleh dengan teknik sampling multistage. Tahap pertama adalah memilih kelurahan dari kota yang telah ditetapkan dalam populasi. Tahap kedua yaitu memilih RW di masing-masing kelurahan yang terpilih. Tahap ketiga adalah memilih responden pada RW yang terpilih pada tahap kedua. Sedangkan sampel responden untuk ahli diperoleh dari *purposive sampling* dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. Kualifikasi Akademisi

- 1) Pendidikan formal adalah sarjana hukum atau sarjana sosial/politik;
- 2) Menjadi dosen di Perguruan Tinggi dengan pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun; dan
- 3) Tidak sedang menjadi pelapor dan menjalankan program bersama KY.

b. Kualifikasi Praktisi Hukum

- 1) Berpengalaman menjalankan profesinya minimal 5 (lima) tahun;
- 2) Pernah melakukan proses beracara di pengadilan; dan
- 3) Tidak sedang menjadi pelapor dan menjalankan program bersama KY.

c. Kualifikasi Aktivistis Hukum

- 1) Berpengalaman sebagai aktivis hukum minimal 5 (lima) tahun;

- 2) Pernah melakukan bantuan hukum atau advokasi; dan
- 3) Tidak sedang menjadi pelapor dan menjalankan program bersama KY.

d. Kualifikasi Jurnalis hukum

- 1) Ditugaskan pada desk/biro/bagian hukum;
- 2) Pengalaman menjadi jurnalis minimal 3 (tiga) tahun; dan
- 3) Tidak sedang menjadi pelapor dan menjalankan program bersama KY

3. Ukuran Sampel

Ukuran sampel untuk masyarakat awam adalah 625 orang. Dengan ukuran sampel sebesar ini maka ditaksir MoE sebesar 0,04 (4%) dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Distribusi 625 responden pada 13 kota ditentukan secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di kota tersebut. Sementara jumlah responden untuk ahli sebesar 100 orang dengan distribusi sesuai dengan proporsi responden survei di atas sebelumnya.

4. Jumlah dan Sebaran Responden

Penentuan jumlah responden masyarakat awam diawali dengan penentuan persentase responden di masing-masing kota berdasarkan rasio dari jumlah penduduk yang memiliki hak untuk memilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2014 di 13 kota. Responden masyarakat awam adalah penduduk yang memiliki hak untuk memilih dengan pertimbangan bahwa penduduk tersebut dianggap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *surveyor*. Berikut ini adalah jumlah dan sebaran responden di 13 kota.

Tabel 2.1. Jumlah dan Sebaran Responden Masyarakat Awam

No.	Kota	Penduduk (DPT)	Persentase	Jumlah Responden
1.	Jakarta	7,070,475	42%	263
2.	Medan	1,746,829	10%	65
3.	Pekanbaru	627,212	4%	23
4.	Palembang	1,144,014	7%	42
5.	Semarang	1,121,824	7%	42
6.	Surabaya	2,017,450	12%	75
7.	Pontianak	416,733	2%	15
8.	Samarinda	572,321	3%	21

No.	Kota	Penduduk (DPT)	Persentase	Jumlah Responden
9.	Manado	351,163	2%	13
10.	Makassar	1,005,446	6%	37
11.	Kupang	201,395	1%	7
12.	Mataram	292,219	2%	11
13.	Ambon	265,747	2%	10
		16,832,828	100%	625

Tabel 2.2. Jumlah dan Sebaran Responden Ahli

No.	Kota	LSM	Jurnalis	Advokat	Akademisi	Jumlah
1.	Jakarta	2	2	3	5	12
2.	Medan	2	1	2	3	8
3.	Pekanbaru	2	1	2	2	7
4.	Palembang	2	1	2	3	8
5.	Semarang	2	1	2	2	7
6.	Surabaya	2	1	2	3	8
7.	Pontianak	2	1	2	2	7
8.	Samarinda	2	1	2	2	7
9.	Manado	2	1	2	2	7
10.	Makassar	2	1	2	3	8
11.	Kupang	2	1	2	2	7
12.	Mataram	2	1	2	2	7
13.	Ambon	2	1	2	2	7
		26	14	27	33	100

B. PROFIL RESPONDEN MASYARAKAT AWAM

Diagram 2.1. Kelompok Umur Responden

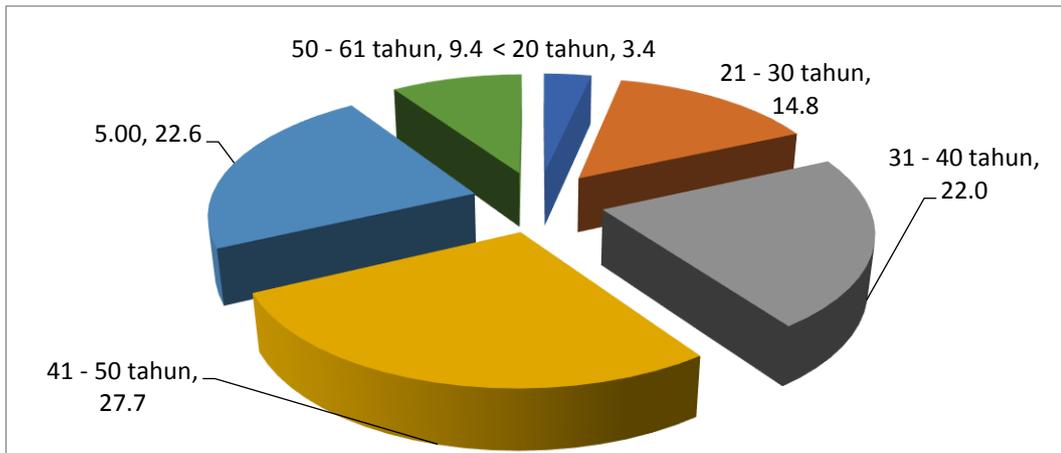


Diagram 2.2. Pekerjaan Utama Responden

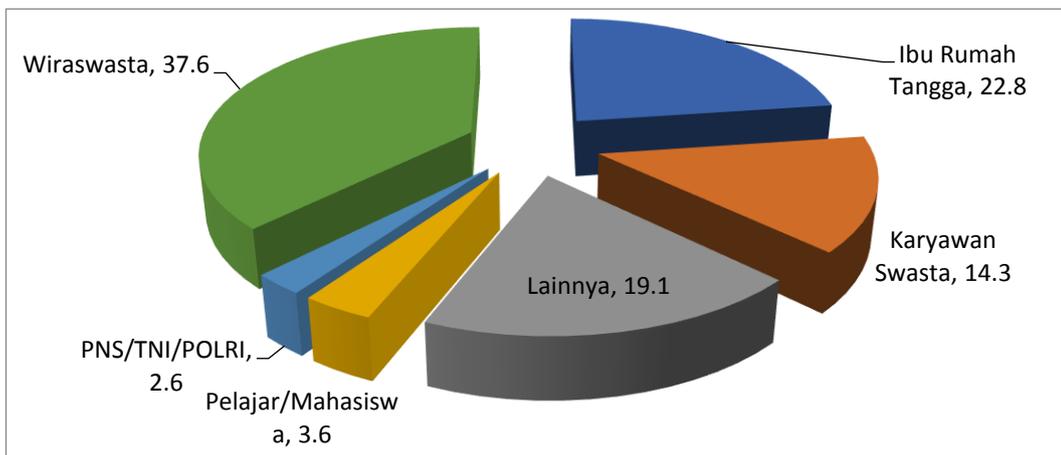


Diagram 2.3. Pendidikan Terakhir Responden

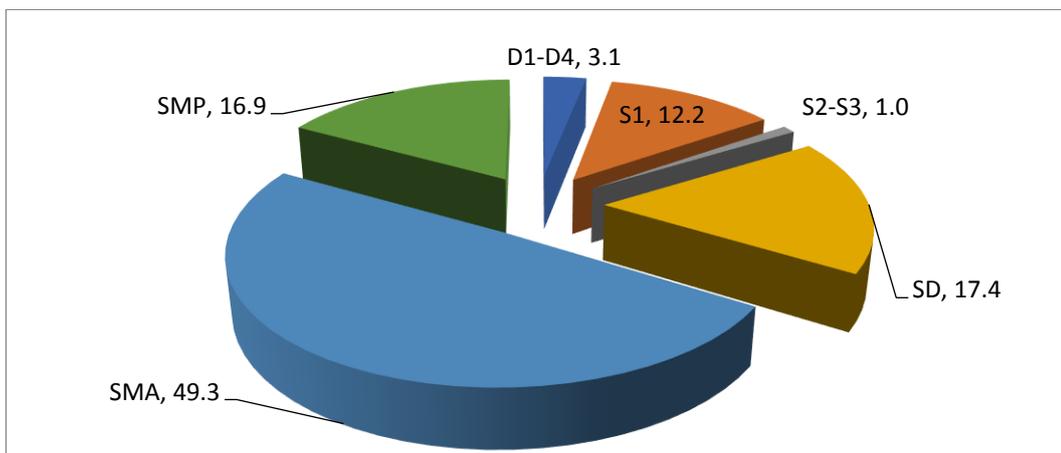
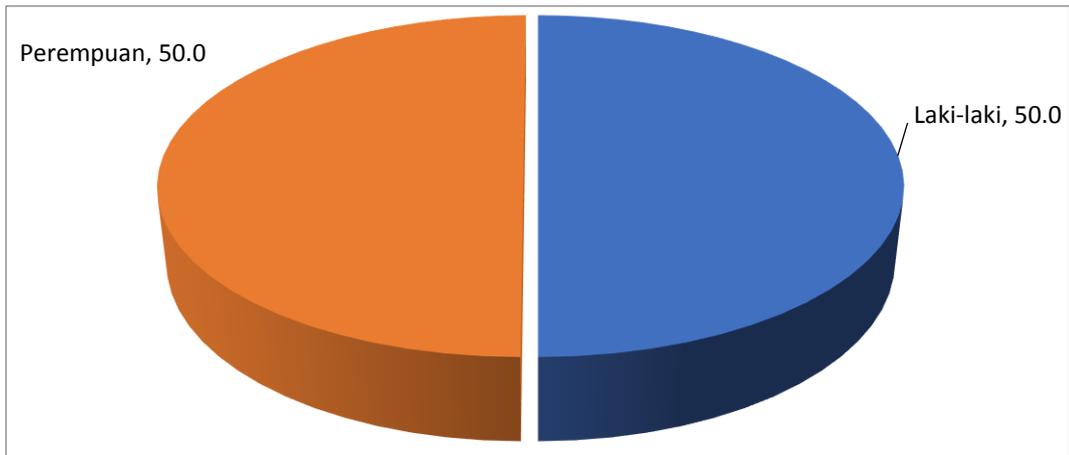


Diagram 2.4. Jenis Kelamin Responden



C. PROFIL RESPONDEN AHLI

Diagram 2.5. Kelompok Umur Responden

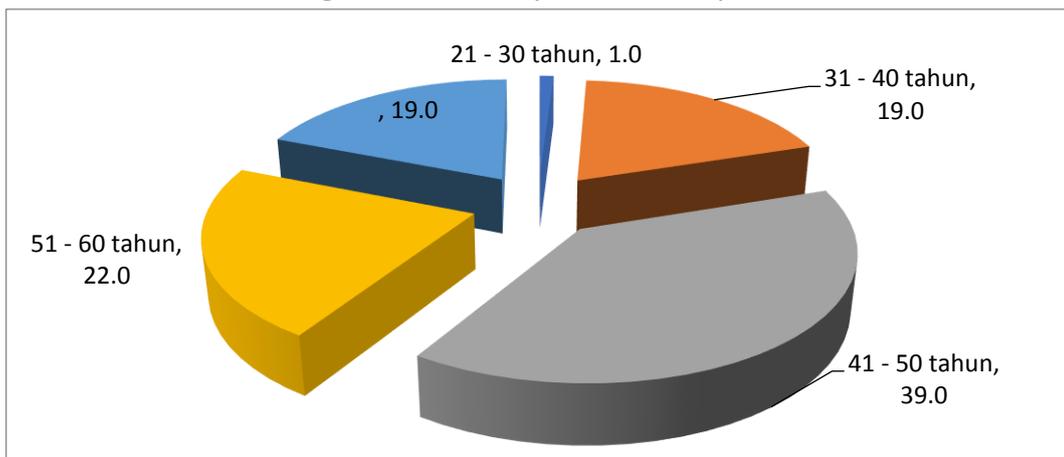


Diagram 2.6. Pekerjaan Utama Responden

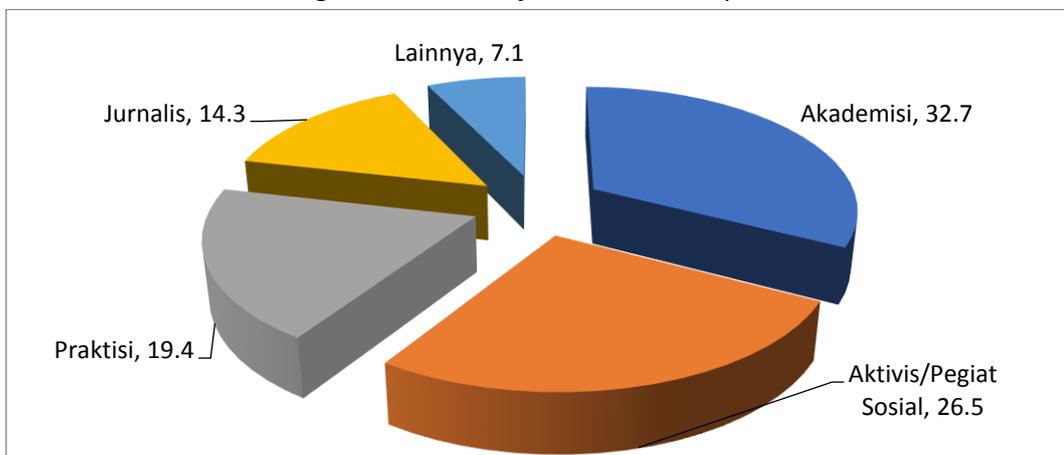


Diagram 2.7. Pendidikan Terakhir Responden

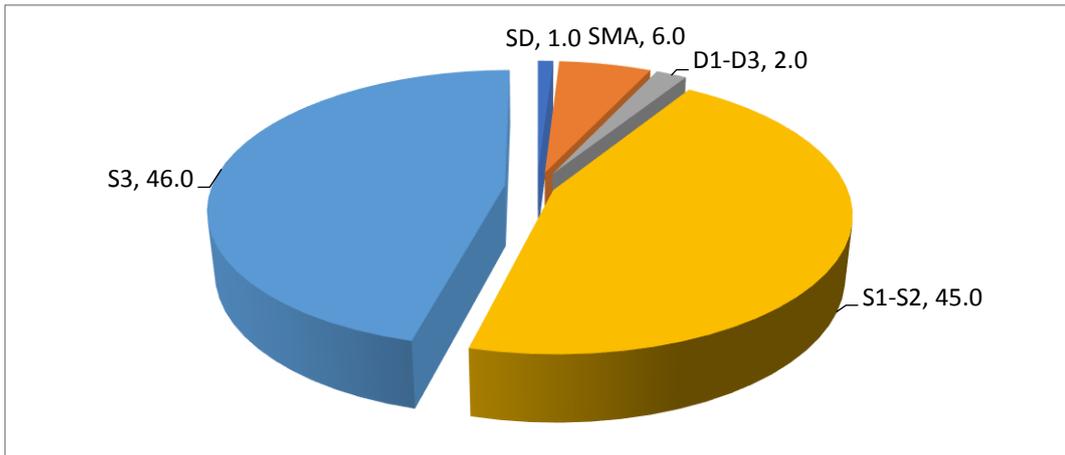
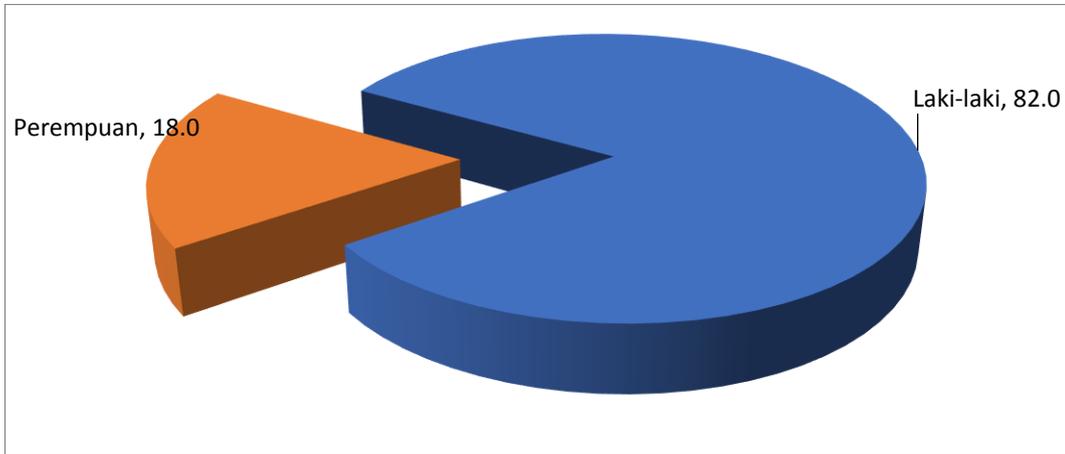


Diagram 2.8. Jenis Kelamin Responden



BAB III – INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT

A. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS

Indeks Persepsi Masyarakat terhadap KY sepanjang tahun 2017 adalah sebesar 79,38. Angka tersebut merupakan hasil penggabungan dan pembobotan antara nilai yang diberikan responden ahli dan masyarakat awam. Dimensi yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Harapan Masyarakat dan yang terendah adalah Kepercayaan Masyarakat. Meskipun berada pada posisi terendah, nilai dimensi Kepercayaan Masyarakat masih dikategorikan baik.

Tabel 3.1. Indeks Persepsi Masyarakat 2017

No.	Dimensi	Nilai Ahli	Nilai Ahli x bobot (0.6)	Nilai Masy. Awam	Nilai Awam x bobot (0.4)	IPM 2017 (Ahli + Awam)
1.	Kesadaran Masyarakat	94,46	56,67	58,23	23,29	79,97
2.	Kepercayaan Masyarakat	77,99	46,79	68,04	27,21	74,01
3.	Harapan Masyarakat	84,89	50,94	83,06	33,23	84,16
Indeks Persepsi Masyarakat						79,38

Jika dibandingkan dengan hasil tahun 2016, maka IPM tahun 2017 mengalami kenaikan 3,27 poin, di mana seluruh dimensi mengalami peningkatan nilai. Kontribusi kenaikan terbesar ada pada dimensi Kesadaran Masyarakat. Sedangkan kenaikan yang paling kecil ada pada dimensi Harapan Masyarakat.

Tabel 3.2. Perbandingan IPM 2016 – 2017

No.	Dimensi	IPM 2016 (Ahli + Awam)	IPM 2017 (Ahli + Awam)	Kenaikan (Penurunan)
1.	Kesadaran Masyarakat	75,56	79,97	4,41
2.	Kepercayaan Masyarakat	70,34	74,01	3,67
3.	Harapan Masyarakat	82,43	84,16	1,73
	Indeks Persepsi Masyarakat	76,11	79,38	3,27

Sebagaimana telah diutarakan pada bagian Bab sebelumnya bahwa setiap dimensi persepsi masyarakat terhadap KY dibangun dari beberapa aspek. Untuk tahun 2017, nilai aspek yang paling rendah berdasarkan persepsi ahli adalah aspek Independensi pada dimensi Kepercayaan Masyarakat, sementara bagi masyarakat awam persepsi terendah ada pada aspek keberadaan lembaga pada dimensi Kesadaran Masyarakat.

Tabel 3.3. Nilai per Aspek

No.	Dimensi	Aspek	Nilai Ahli	Nilai Rata2 Ahli	Nilai Masy. Awam	Nilai Rata2 Masy. Awam
1.	Kesadaran Masyarakat	Keberadaan Lembaga	88,82	94,46	41,33	58,23
		Kewenangan	100,00		49,83	
		Partisipasi	94,55		83,54	
2.	Kepercayaan Masyarakat	Kinerja	75,69	77,99	65,37	68,04
		Keinginan Publik untuk berpartisipasi	85,00		84,44	
		Independensi	73,27		54,30	
3.	Harapan Masyarakat	Keberadaan Lembaga	96,16	84,89	90,51	83,06
		Kewenangan	73,76		75,50	
		Partisipasi	88,23		84,75	
		Prioritas	81,42		81,49	

Keterangan: arsir kuning menunjukkan nilai terendah
arsir hijau menunjukkan nilai tertinggi

Terlihat korelasi persepsi masyarakat awam pada aspek keberadaan lembaga KY. Di mana kesadaran masyarakat terhadap keberadaan lembaga mendapatkan nilai terendah, sementara harapan masyarakat terhadap keberadaan lembaga mendapatkan nilai tertinggi.

Kemudian meskipun aspek independensi dari kacamata ahli mendapatkan nilai terendah, nilai tersebut masih dalam batas yang cukup baik.

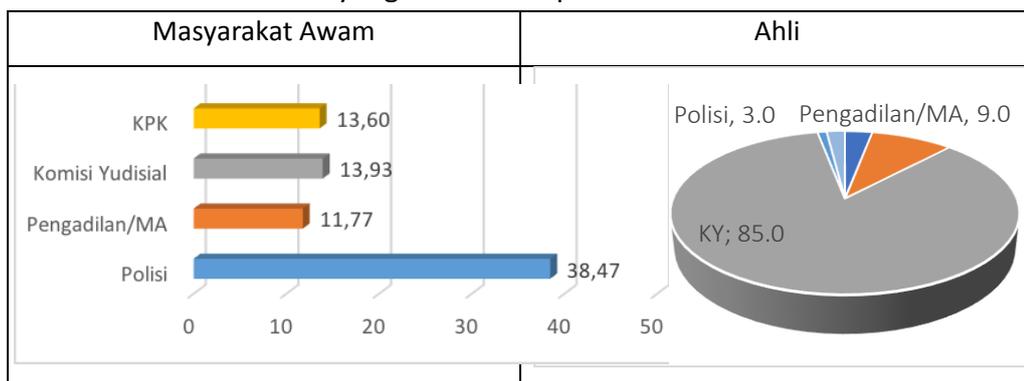
B. KESADARAN MASYARAKAT

1. Keberadaan Lembaga

Aspek keberadaan lembaga pada dimensi kesadaran masyarakat mendapatkan nilai terendah (41,33) dari 10 aspek Indeks Persepsi Masyarakat berdasarkan hasil survei terhadap masyarakat awam. Nilai tersebut kurang dari separuh dari nilai yang diperoleh berdasarkan survei ahli (88,82).

Terdapat perbedaan signifikan antara preferensi masyarakat awam dengan ahli ketika dihadapkan pada situasi menemukan adanya hakim yang melakukan perbuatan tercela. Masyarakat awam lebih memilih kepolisian sebagai tempat untuk melaporkan hakim yang melakukan perbuatan tercela. Meskipun demikian, preferensi masyarakat awam untuk melapor ke KY lebih tinggi dibandingkan ke Pengadilan/MA. Sedangkan ahli memiliki preferensi untuk melaporkannya kepada KY.

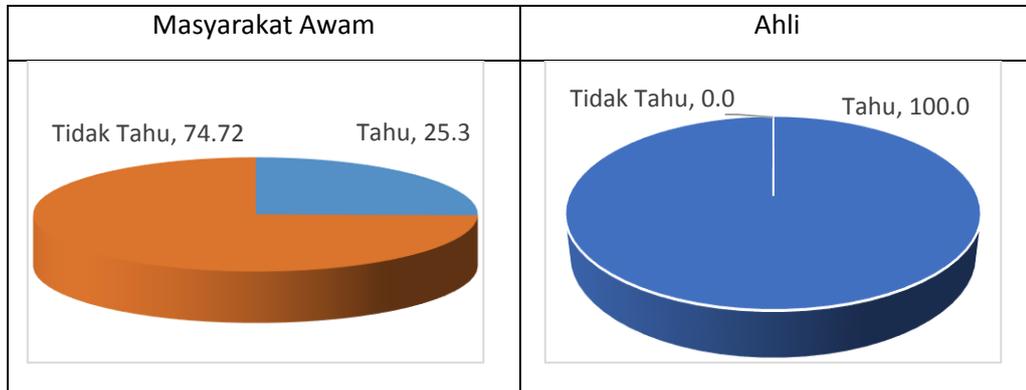
Diagram 3.1. Preferensi lembaga yang dipilih responden untuk melaporkan hakim yang melakukan perbuatan tercela



Preferensi baik masyarakat awam maupun ahli di atas terkonfirmasi ketika dua responden tersebut ditanyakan pengetahuannya tentang lembaga KY. Di mana

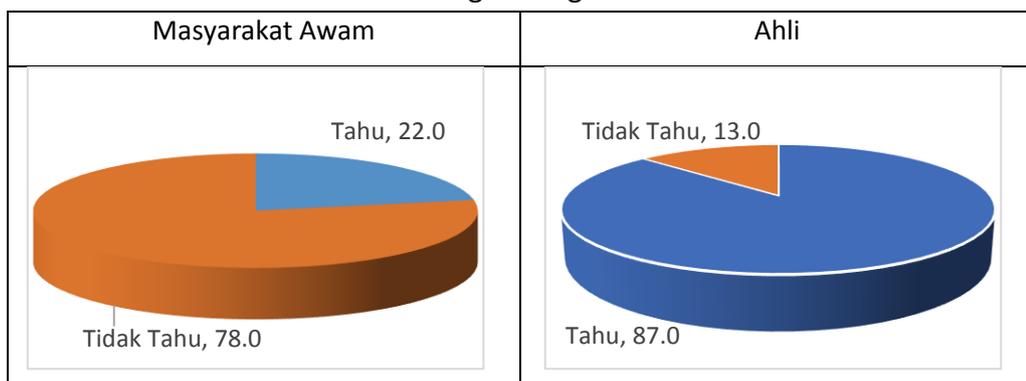
hanya 25,3% responden masyarakat awam yang mengetahui adanya lembaga KY. Sebaliknya, seluruh responden ahli mengetahui keberadaan KY.

Diagram 3.2. Pengetahuan responden tentang keberadaan lembaga KY



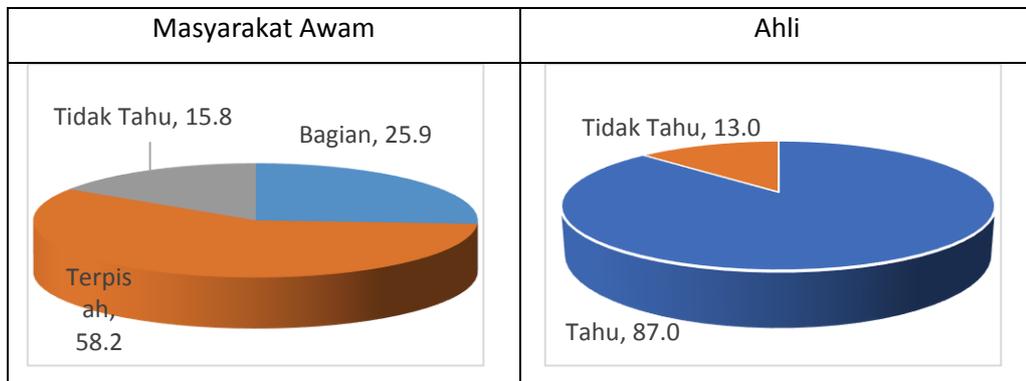
Meskipun seluruh responden ahli mengetahui keberadaan KY, masih terdapat ahli yang tidak tahu keberadaan Kantor Penghubung KY. Padahal survei dilakukan di kota yang memiliki Kantor Penghubung KY. Sehingga temuan survei ini menjadi bahan evaluasi bagi keberadaan Kantor Penghubung KY.

Diagram 3.3. Pengetahuan responden tentang keberadaan Kantor Penghubung KY



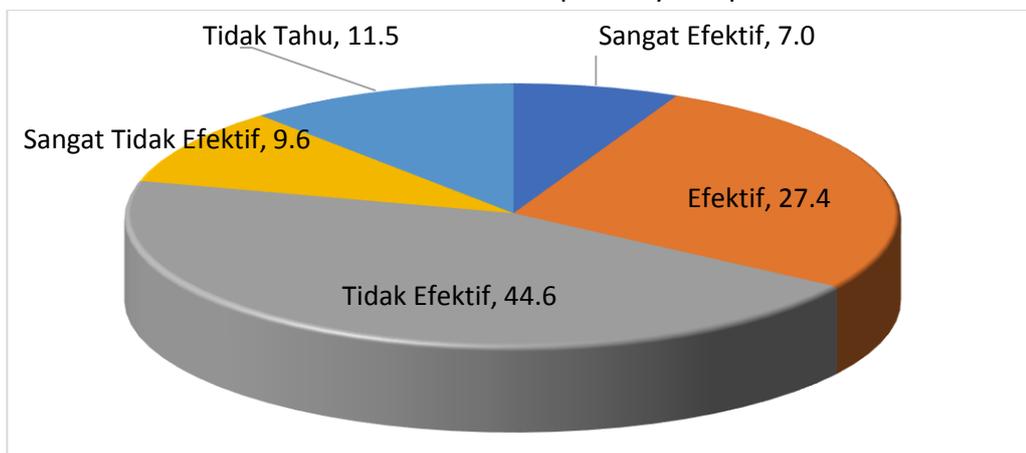
Untuk responden yang mengetahui keberadaan KY, masih ada responden yang beranggapan bahwa KY adalah bagian dari lembaga peradilan. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian baik oleh KY maupun Kantor Penghubung untuk menegaskan kepada masyarakat terkait kedudukan KY sebagai lembaga independen.

Diagram 3.4. Pengetahuan responden tentang keterkaitan lembaga KY dengan lembaga peradilan



Belum diketahui dan dipahaminya keberadaan KY di kalangan masyarakat awam terkonfirmasi dengan pendapat yang menyatakan bahwa sosialisasi belum sepenuhnya efektif. Hal ini ditunjukkan dengan pandangan bahwa sosialisasi dianggap efektif hanya oleh 27,4% responden awam, dan lebih dari separuh responden menilai bahwa sosialisasi peran KY ke publik tidak efektif.

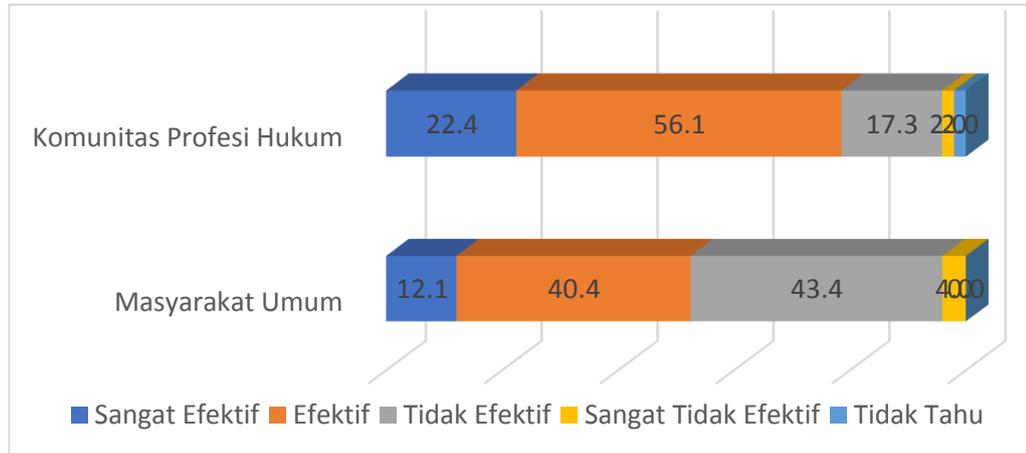
Diagram 3.5. Pendapat responden masyarakat awam terhadap efektivitas KY dalam mensosialisasikan perannya ke publik



Masih terdapat pekerjaan rumah bagi KY dan Kantor Penghubung untuk mengefektifkan sosialisasi perannya kepada masyarakat awam. Setidaknya hal tersebut diutarakan oleh 47,4% responden ahli, yang menyatakan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat umum tidak/sangat tidak efektif. Sedangkan

sosialisasi untuk komunitas profesi hukum, masih terdapat penilaian tidak efektif oleh lebih dari 17% responden ahli.

Diagram 3.6. Pendapat responden ahli terhadap efektivitas KY dalam mensosialisasikan perannya ke publik

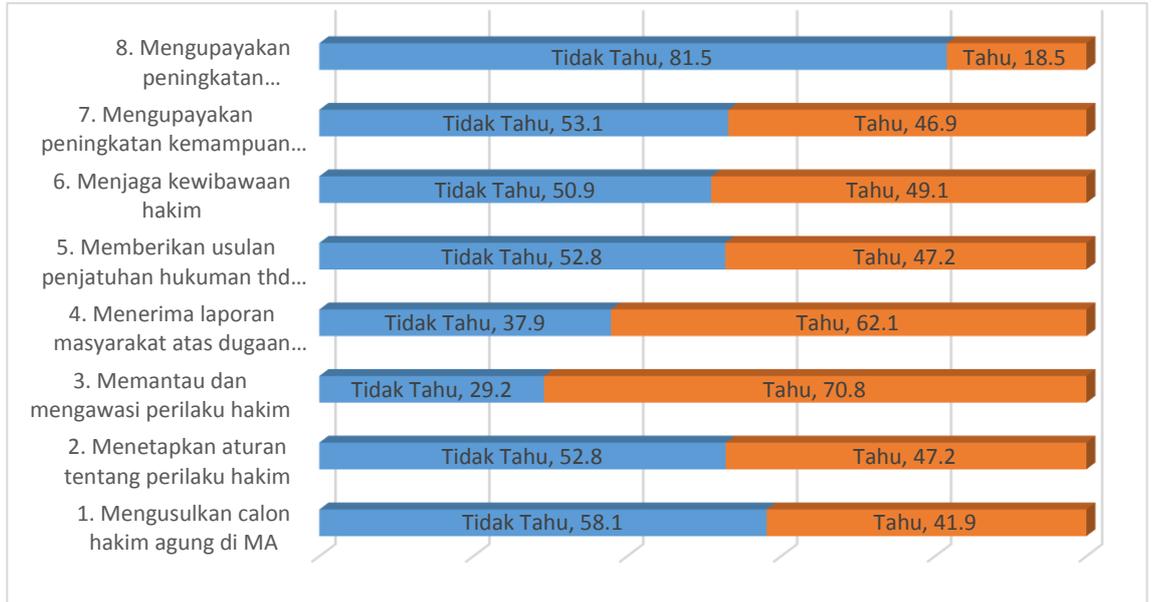


2. Kewenangan Lembaga

Pada aspek ini, skor yang diperoleh dari survei ahli adalah paripurna (100) dan dari survei masyarakat awam kurang dari separuhnya (49,83).

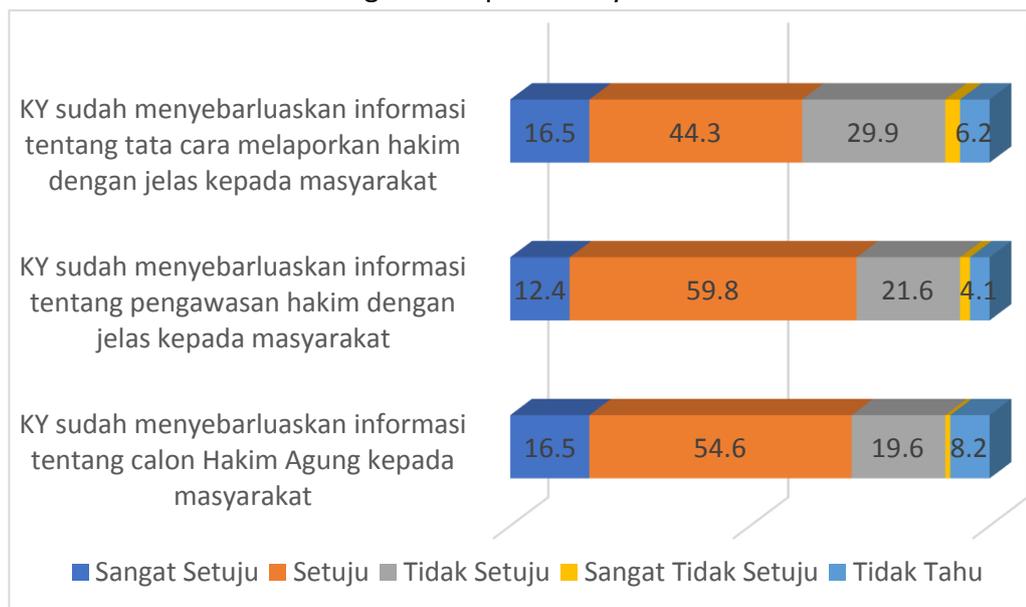
Wewenang KY yang paling populer bagi masyarakat awam adalah memantau dan mengawasi perilaku hakim; dan menerima laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH. Sedangkan wewenang yang paling tidak populer adalah mengupayakan kesejahteraan hakim; dan mengusulkan calon hakim agung di MA. Artinya, terdapat kecenderungan masyarakat yang menempatkan KY sebagai lembaga yang mengawasi perilaku hakim.

Diagram 3.7. Pengetahuan responden masyarakat awam tentang wewenang lembaga KY



Hal ini cukup sejalan dengan pandangan sebagian besar ahli yang menyatakan bahwa KY telah menyebarluaskan informasi dengan jelas terkait pengawasan hakim kepada masyarakat. Sedangkan terdapat kontradiksi pada seleksi calon hakim Agung, di mana meskipun sebagian besar ahli berpendapat bahwa informasi tersebut sudah disebarluaskan KY, masih cukup banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui adanya wewenang tersebut.

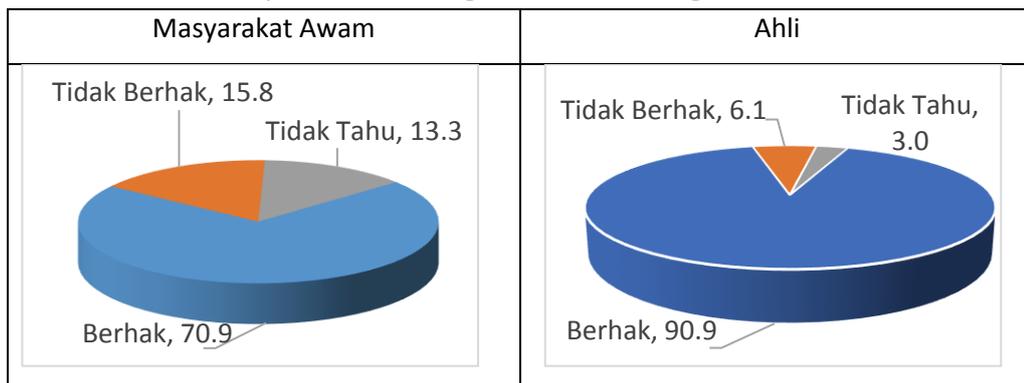
Diagram 3.8. Pendapat responden ahli tentang penyebaran informasi tugas KY kepada masyarakat



3. Partisipasi Masyarakat

Dalam dimensi kesadaran publik, aspek partisipasi masyarakat awam mendapatkan skor tertinggi (83,54) jika dibandingkan dua aspek lainnya. Demikian halnya dengan skor yang diperoleh dari survei ahli (94,55) yang menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat yang tinggi terkait ruang partisipasi publik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KY.

Diagram 3.9. Pengetahuan responden tentang hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KY



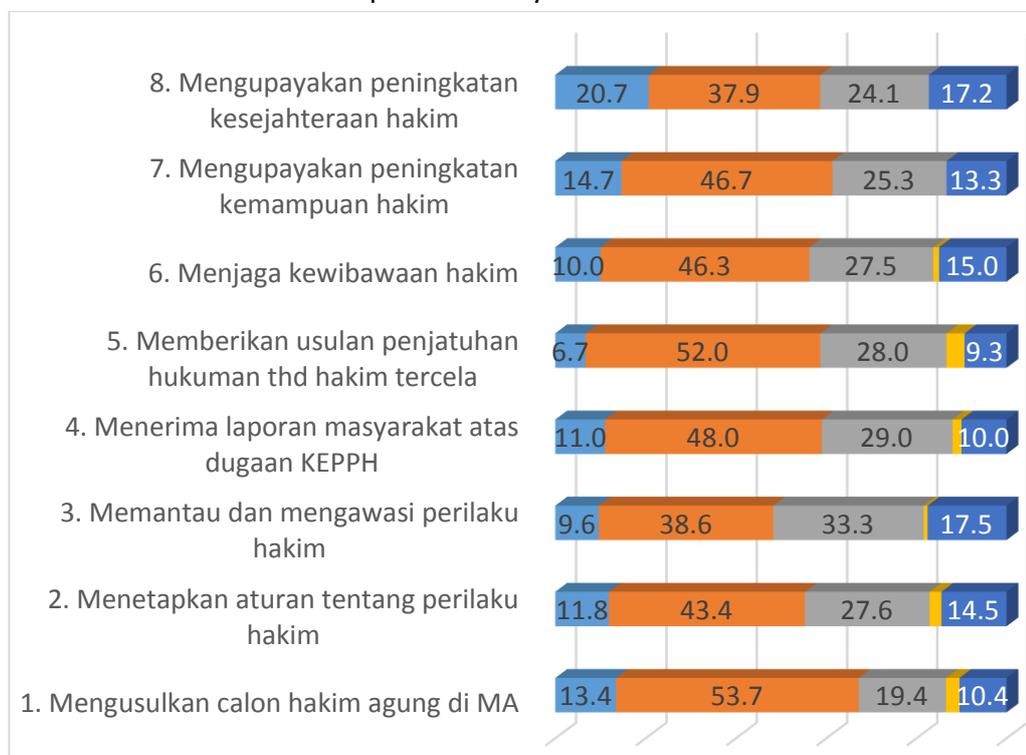
C. KEPERCAYAAN MASYARAKAT

1. Kinerja KY

Terhadap kinerja KY, survei ahli menghasilkan nilai 75,69 sedangkan dari survei masyarakat awam nilai aspek ini sebesar 65,37.

Wewenang pengawasan hakim yang dinilai paling populer (diketahui) oleh masyarakat awam ternyata tidak sebanding dengan penilaian efektivitasnya. Sebaliknya, pelaksanaan wewenang untuk mengusulkan calon hakim Agung dinilai masyarakat awam paling efektif meskipun wewenang tersebut paling tidak populer dari sudut pandang masyarakat awam.

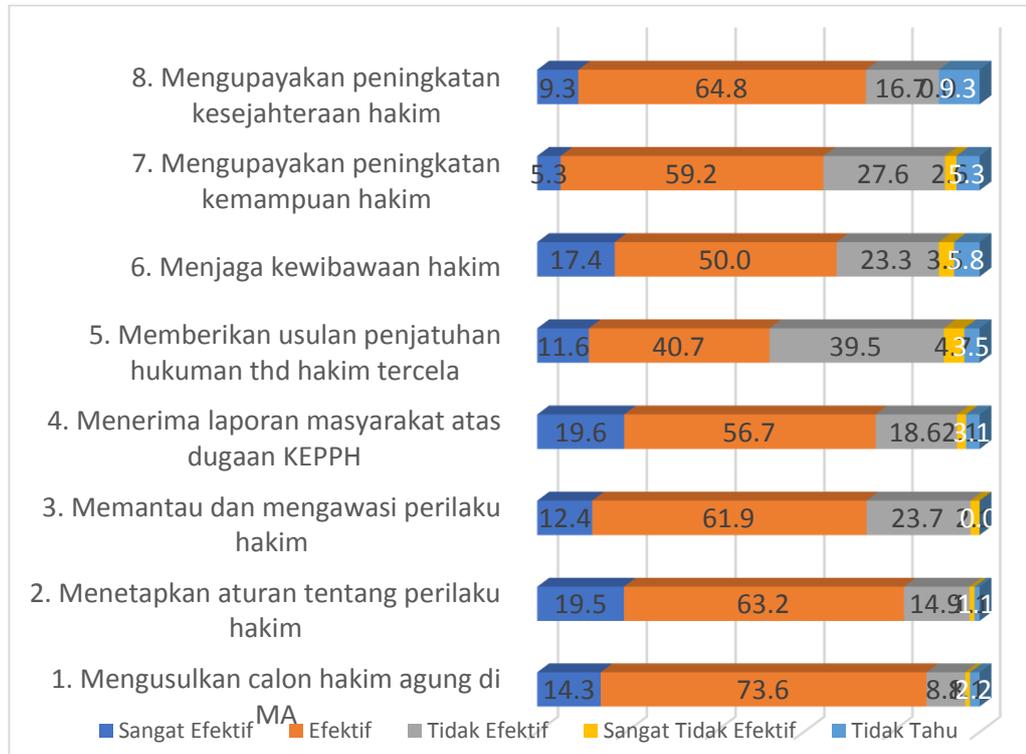
Diagram 3.10. Efektivitas KY dalam menjalankan kewenangannya menurut responden masyarakat awam



Pengusulan calon hakim agung oleh KY juga dinilai sebagai wewenang paling efektif pelaksanaannya oleh responden ahli, disusul dengan wewenang untuk menetapkan aturan tentang perilaku hakim atau yang dikenal sebagai KEPPH. Penetapan atau revisi KEPPH dalam beberapa kajian KY terkini menjadi sebuah urgensi untuk segera dilakukan, mempertimbangkan bahwa silang pendapat

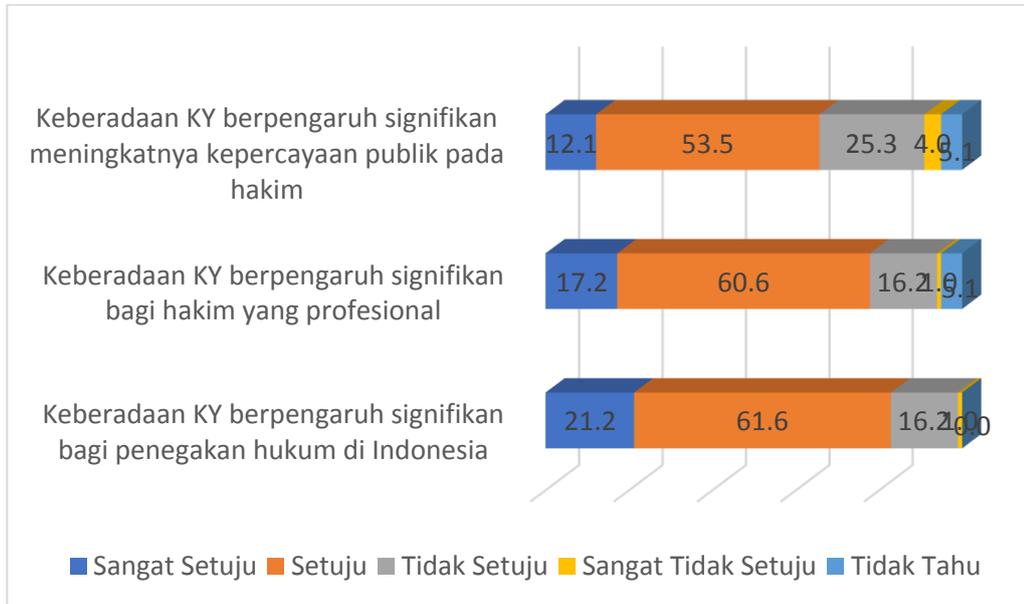
tentang ‘teknis yudisial’ dan perilaku antara MA dan KY dapat diselesaikan melalui perbaikan terhadap KEPPH.

Diagram 3.11. Efektivitas KY dalam menjalankan kewenangannya menurut responden ahli



Dampak dari kinerja KY menurut responden ahli cenderung positif. Perhatian seyogianya diberikan KY terhadap pendapat ahli yang tidak setuju (29,3%) bahwa KY berpengaruh signifikan pada peningkatan kepercayaan publik terhadap hakim. Tantangan lain yang perlu direspon oleh KY adalah mempertahankan persepsi publik bahwa keberadaan lembaga ini memiliki dampak yang signifikan terhadap hakim yang profesional dan penegakan hukum di Indonesia.

Diagram 3.12. Penilaian responden ahli terhadap dampak kinerja lembaga KY

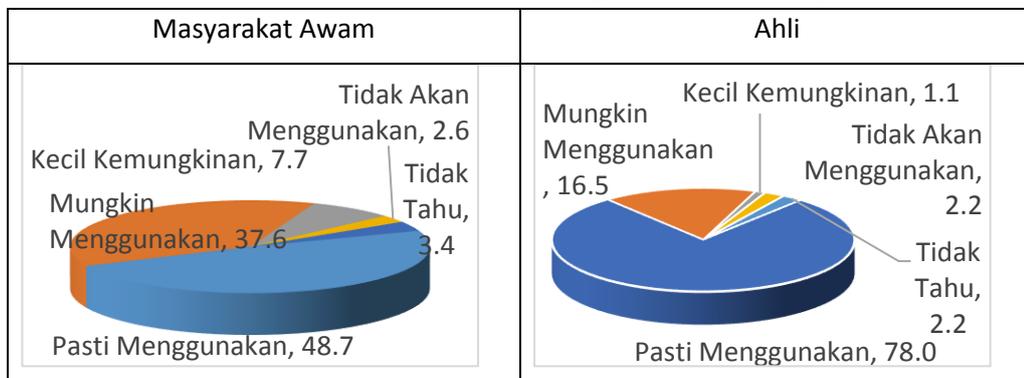


2. Keinginan Publik Berpartisipasi

Aspek keinginan publik untuk berpartisipasi mendapatkan nilai tertinggi untuk dimensi kepercayaan masyarakat, yakni 85 dari hasil survei ahli dan 84,44 dari hasil survei masyarakat awam.

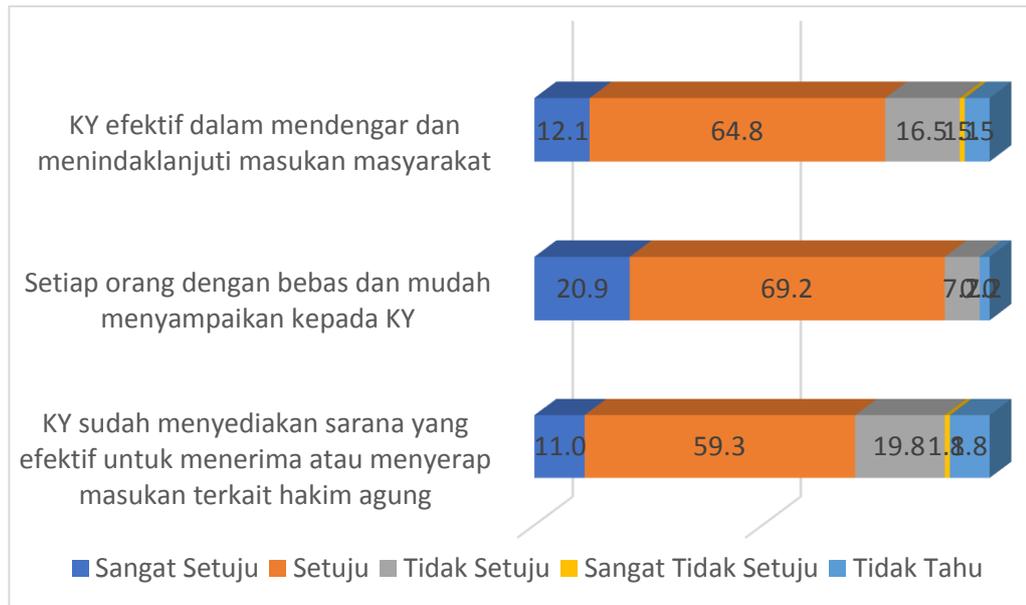
Penilaian tersebut tergambar dari sedikitnya responden yang memilih untuk tidak akan menggunakan akses informasi yang disediakan oleh KY untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat mensyaratkan adanya akses terutama terhadap informasi (transparansi). Tantangan terhadap KY bukan lagi pada penyediaan akses, tetapi pada penyediaan informasi kepada publik yang kredibel (substentif).

Diagram 3.13. Kemungkinan responden menggunakan akses informasi ketika berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KY



Capaian skor yang tinggi pada aspek ini juga diperoleh dari pandangan ahli yang menilai bahwa KY telah efektif dalam mengimplementasikan partiipasi publik. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden ahli sebagaimana diagram berikut di bawah ini.

Diagram 3.14. Efektivitas partisipasi publik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KY

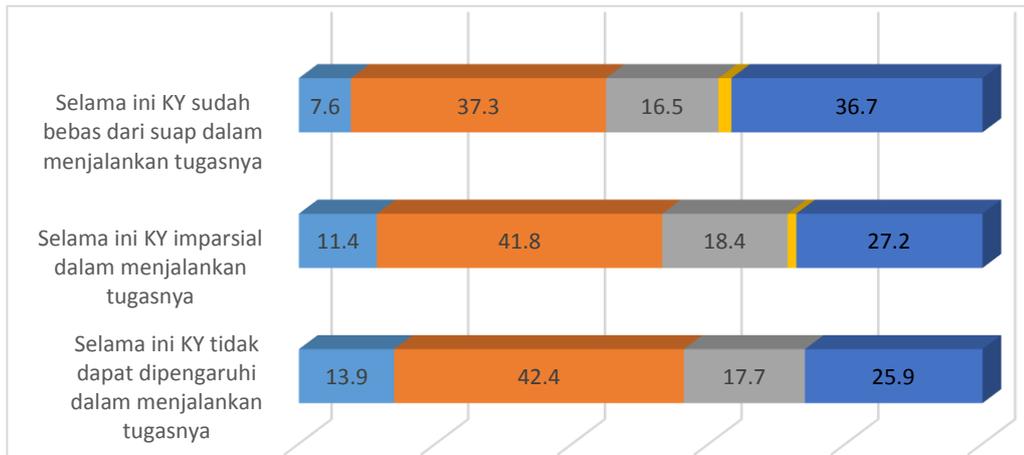


3. Independensi KY

Dalam dimensi Kepercayaan Masyarakat, aspek independensi kelembagaan baik berdasarkan hasil survei masyarakat awam maupun ahli mendapatkan skor paling rendah.

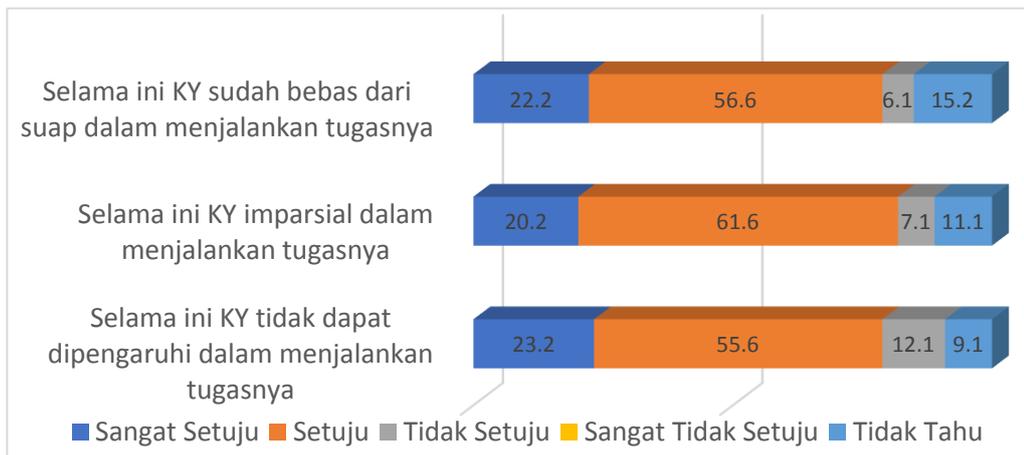
Jika menilik hasil survei masyarakat awam terkait independensi KY, maka terlihat cukup banyak masyarakat yang menjawab tidak tahu (di atas 25%). Sekali lagi, penyampaian informasi terkait kedudukan dan kinerja KY memiliki peran penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Diagram 3.15. Persepsi Masyarakat Awam terkait Independensi KY



Meskipun mendapatkan nilai paling rendah dari seluruh aspek yang ditanyakan kepada ahli, aspek independensi KY menurut responden ahli masih dalam angka yang cukup baik (73,27). Penting bagi KY untuk mencermati pandangan dari 12,1% responden ahli yang menyatakan KY dapat dipengaruhi dalam menjalankan tugasnya.

Diagram 3.16. Persepsi Ahli terkait Independensi KY

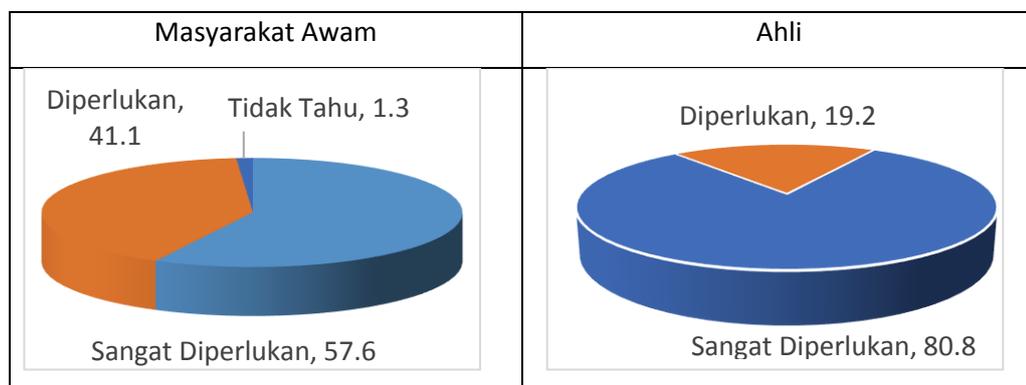


D. HARAPAN MASYARAKAT

1. Keberadaan Lembaga

Harapan masyarakat terhadap keberadaan lembaga KY mendapatkan nilai yang sangat tinggi meskipun tidak paripurna. Nilai aspek keberadan lembaga berdasarkan hasil survei ahli adalah 96,16; dan hasil survei masyarakat awam adalah 90,51. Tidak ada responden yang berpendapat KY tidak lagi diperlukan. Bahkan sebagian besar responden menyatakan KY masih sangat diperlukan.

Diagram 3.17. Pendapat responden terkait masih diperlukan/tidaknya keberadaan KY



2. Kewenangan Lembaga

Aspek kewenangan lembaga KY pada dimensi Harapan Masyarakat menunjukkan nilai yang cukup baik, yaitu 73,76 berdasarkan survei masyarakat awam dan 83,06 menurut penghitungan hasil survei ahli. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa wewenang KY perlu dikurangi.

Untuk masyarakat awam, harapan tertinggi untuk penguatan wewenang KY ada pada penetapan aturan tentang perilaku hakim (KEPPH) diikuti dengan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim. Sedangkan peningkatan kemampuan hakim dinilai sebagai wewenang yang paling memadai..

Sedikit berbeda dari pandangan ahli di mana preferensi wewenang yang paling perlu diperkuat adalah memantau dan mengawasi perilaku hakim dan memberikan usulan penjatuhan hukuman terhadap hakim yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Diagram 3.18. Harapan responden masyarakat awam terkait wewenang KY

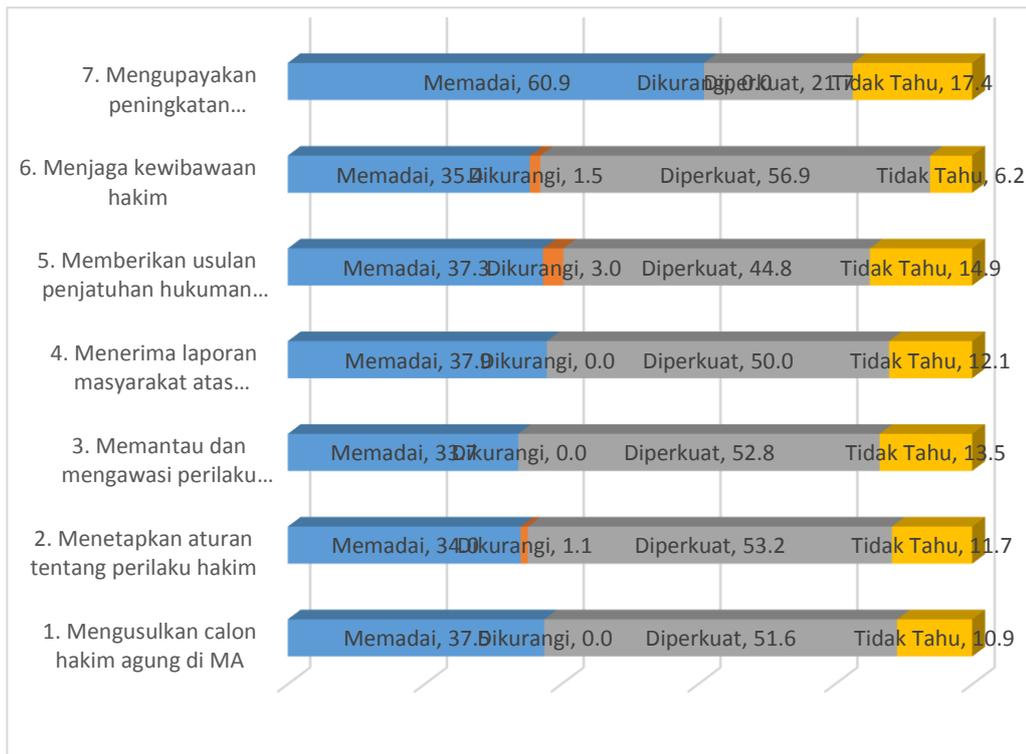
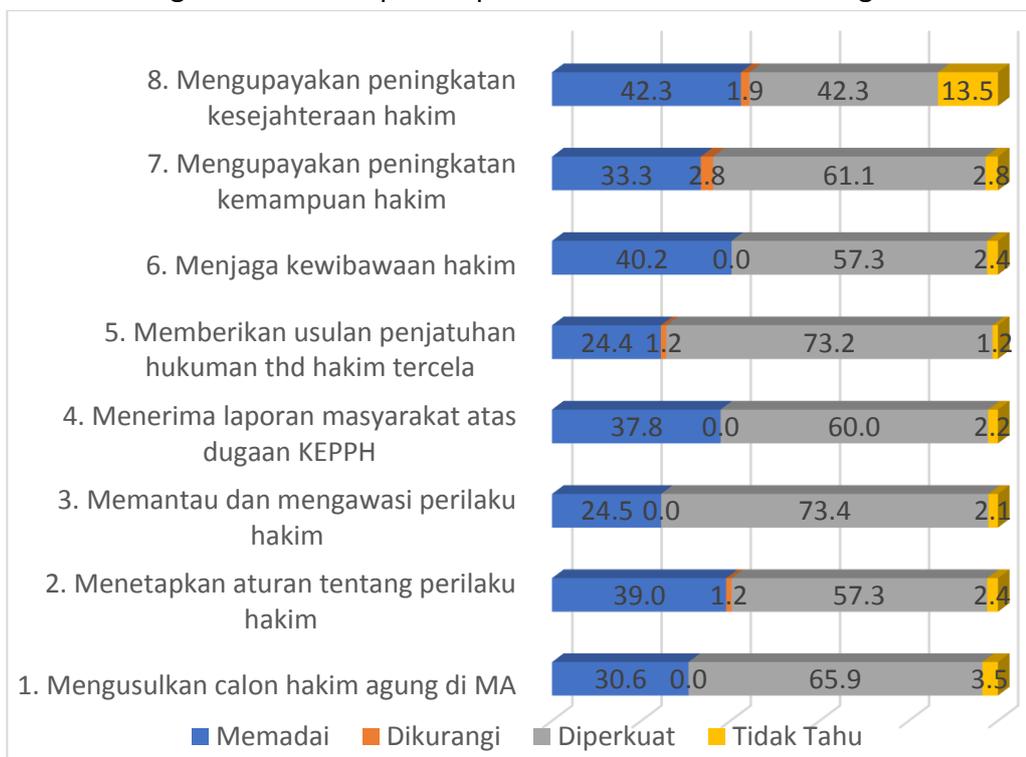


Diagram 3.19. Harapan responden ahli terkait wewenang KY

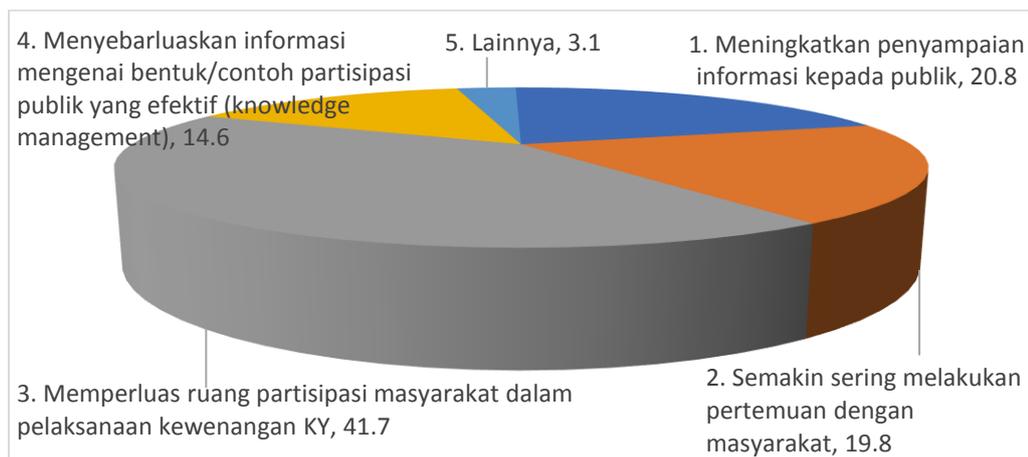


3. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil survei masyarakat awam maupun ahli, aspek partisipasi masyarakat pada dimensi Harapan Masyarakat mendapatkan nilai yang tinggi masing-masing 88,23 dan 84,74.

Saran terbanyak yang disampaikan ahli terkait dengan partisipasi publik adalah perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan wewenang KY. Survei tidak mendalami teknis dari perluasan yang dimaksud, untuk itu diperlukan penggalian informasi mengenai hal tersebut melalui forum diskusi dan sebagainya.

Diagram 3.20. Saran responden ahli terkait partisipasi masyarakat

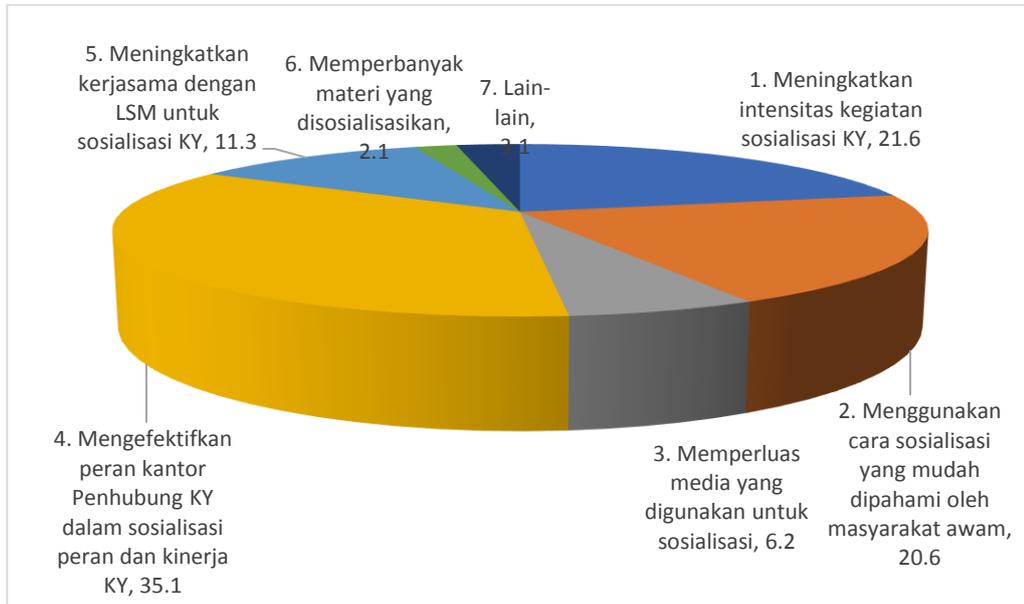


4. Prioritas Lembaga

Aspek prioritas lembaga pada dimensi Harapan Masyarakat juga memiliki penilaian yang tinggi menurut survei masyarakat awam (81,42) dan survei ahli (81,49).

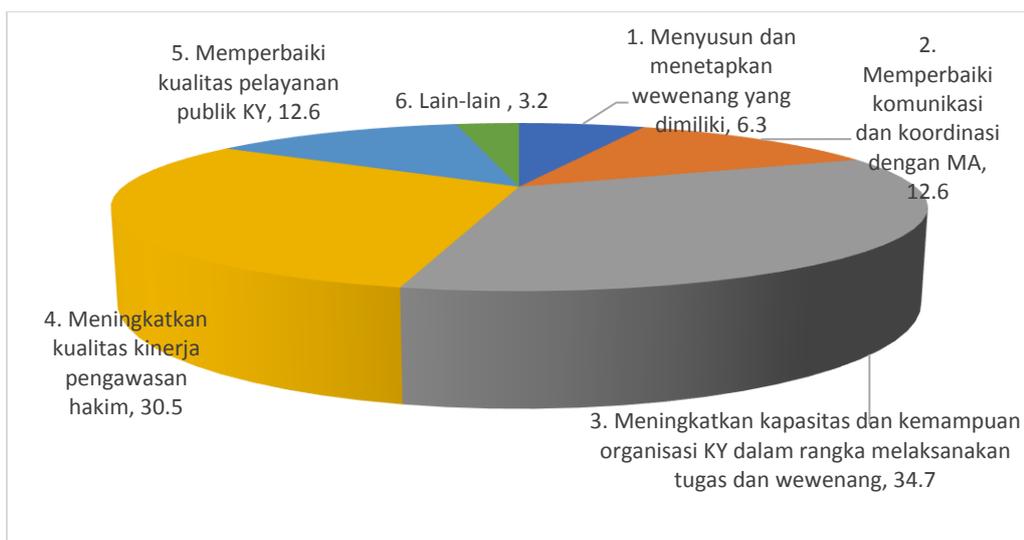
Efektivitas Kantor Penghubung KY dalam sosialisasi peran dan kinerja KY menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh KY terkait keberadaan KY. Hal tersebut dikemukakan oleh sebagian besar responden ahli 35,1%, di samping meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi KY (21,6%).

Diagram 3.21. Saran responden ahli terkait keberadaan KY



Sedangkan prioritas yang perlu dilakukan oleh KY terkait dengan kewenangannya adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi KY (34,7%) dan meningkatkan kualitas kinerja pengawasan hakim (30,5%). Salah satu upaya yang dapat dilakukan KY terkait prioritas tersebut adalah melalui Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KY.

Diagram 3.22. Saran responden ahli terkait kewenangan KY



BAB IV – PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan indeksasi hasil survei persepsi masyarakat, baik dengan responden masyarakat awam maupun ahli, diketahui bahwa IPM KY tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3,27 poin menjadi 79,38. Predikat yang dapat diberikan terhadap nilai tersebut adalah Baik.

Peningkatan tertinggi terdapat pada dimensi Kesadaran Masyarakat sebesar 4,41 poin, dan yang terendah adalah dimensi Harapan Masyarakat sebesar 1,73 poin. Meskipun dimensi Harapan Masyarakat memperoleh peningkatan terendah, tetapi secara keseluruhan dimensi masih yang paling berkontribusi bagi IPM KY di tahun 2017 (84,16 poin). Tren yang sama terjadi pada dimensi Kepercayaan Masyarakat yang berkontribusi paling sedikit bagi IPM KY tahun 2017 sebesar 74,01 poin.

Dari 10 aspek yang membentuk persepsi masyarakat terhadap KY, terdapat satu aspek yang berpredikat kurang baik yaitu aspek Kinerja pada dimensi Kepercayaan Masyarakat menurut survei masyarakat awam (65,37). Selain itu terdapat 3 (tiga) aspek yang nilainya berpredikat tidak baik, yang ketiganya juga berasal dari hasil survei masyarakat awam, yaitu:

1. Aspek Keberadaan Lembaga pada dimensi Kesadaran Masyarakat (41,33%);
2. Aspek Kewenangan pada dimensi Kesadaran Masyarakat (49,83); dan
3. Aspek Independensi pada dimensi Kepercayaan Masyarakat (54,30).

B. REKOMENDASI

Bercermin dari hasil survei persepsi masyarakat dan penilaiannya perlu dilakukan beberapa tindak lanjut oleh KY untuk meningkatkan IPM pada tahun berikutnya, yaitu:

1. Optimalisasi peran Kantor Penghubung KY dalam mensosialisasikan keberadaan dan peran KY yang lebih menjangkau masyarakat awam. Komisi Yudisial perlu mengembangkan strategi sosialisasi yang menjadi pedoman bagi Kantor Penghubung yang dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah di mana Kantor Penghubung berada;
2. Peningkatan kapasitas jejaring yang selama ini dilakukan oleh KY terhadap jejaring di daerah, perlu juga diimbangi dengan peningkatan kapasitas Kantor Penghubung KY itu sendiri dan tentunya kapasitas organisasi di internal KY sendiri;
3. Secara substansi, KY perlu memetakan isu strategis yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Isyu tersebut tidak hanya terkait keberhasilan atau capaian KY semata, tetapi juga problematika dunia peradilan yang membutuhkan dukungan dan partisipasi publik untuk bersama-sama KY mengatasinya.